

BAB I PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1.1.2 Tujuan Penyusunan Pelaporan Keuangan

Laporan Keuangan yang disusun oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayumenyajikan informasi yang bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan sebagai pelaksanaan kegiatan pada lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayudengan:

1. Memberikan informasi / data mengenai jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dicapai.
2. Memberikan informasi / data mengenai jumlah Pengeluaran yang dicapai.
3. Memberikan informasi / data guna mengevaluasi hasil – hasil yang telah dicapai selama satu tahun periode.

Untuk memenuhi tujuan – tujuan tersebut maka didalam laporan keuangan menyediakan informasi mengenai Pendapatan, Belanja dan Aset Badan Pendapatan Daerah. Lapoaran Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja, terdiri dari unsur : Pendapatan, Belanja, surplus / (defisit).

b. Laporan Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun

2020 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan

terdiri atas ;

- a. Aset Lancar
- b. Piutang Pajak
- c. Persediaan
- d. Aset Tetap
- e. Ekuitas Dana

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional terdiri dari unsur : I. Kegiatan Operasional terdiri : I. Pendapatan LO senilai II. Beban, III. Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit LO.

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode yang terdiri atas Ekuitas awal dan Ekuitas Akhir.

e. CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan)

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau

dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah. Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan

- kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasangkayu (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 7 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017;
 15. Peraturan Bupati Kabupaten Pasangkayu Nomor 39 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasangkayu;

16. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017;
17. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020.
20. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020.

1.3. Unsur Laporan Keuangan

Laporan Keuangan OPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020, yang terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Operasional (LO)
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
4. Neraca;
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:

- a. Menyajikan informasi tentang pencapaian target yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;

- c. Menyajikan informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; dan
- e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1 Ekonomi Makro

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi yang ada.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di OPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu adalah di bidang pengeluaran dan aset daerah. Pemerintah daerah melakukan pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan bagi Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Umum serta Pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

2.3 Program Pencapaian Target Kinerja

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2020, OPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayumempunyai 6 program dalam urusan pelayanan umum, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat 26 kegiatan yang mengikutinya.

Adapun Program-program dan kegiatan APBD OPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Badan/operasional
 5. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 6. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 7. Penyediaan alat tulis kantor
 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 10. Penyediaan Makanan dan Minuman
 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
 13. Penyediaan jasa kantor
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;**
1. Pengadaan peralatan gedung kantor
 2. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Badan/operasional
 4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;**
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 4. Penyusunan Renja, RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD
- 5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.**
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah

2. Pemeriksana /Penangan Kasus Atas Kepatuhan Wajib Pajak dalam Bidang Perpajakan Daerah
3. Upaya Peningkatan PAD Melalui Peninjauan Zona Nilai Tanah PBB P2
4. Penyusunan Peraturan Bupati Pajak Air Bawah Tanah Dan Pajak Hiburan

6. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

1. Pencetakan Massal dan Pencetakan Baliho

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1. ENTITAS AKUNTANSI

Entitas akuntansi yang dimaksud adalah merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan.

1.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Badan Pendapatan Daerah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

1.3. BASIS PENGUKURAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.

Kas di bendahara pengeluaran

Kas di bendahara pengeluaran yang belum disetor merupakan sisa uang persediaan pada bendahara pengeluaran yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 belum disetor ke rekening kas daerah dan merupakan bagian dari SiLPA Tahun 2020.

Kas di Bendahara Penerimaan OPD

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pada Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah(baik yang ada direkening bank maupun brankas) yang berasal dari pendapatan retribusi, lain-lain PAD yang sah dan jasa giro bendahara yang belum disetor ke rekening kas umum daerah per 31 Desember 2020.

Piutang

Piutang adalah pendapatan yang sudah menjadi hak Pemerintah Kabupaten Pasangkayutetapi sampai dengan 31 Desember 2020 belum terbayar oleh wajib pajak.

Persediaan

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventaris fisik. Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir.

Pengukuran Aset Tetap secara Umum

- a. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan belanja modal ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan dalam periode berjalan.
- b. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- c. Dalam pengakuan aset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.
- d. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- e. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- f. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan.
- g. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aset tetap yang diperoleh karena penukaran dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diperoleh atau nilai wajar aset tetap yang diserahkan, mana yang lebih mudah.
- h. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang hilang dan sebagainya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- i. Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya pembebasan tanah, biaya

untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan.

Peralatan dan Mesin

Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Gedung dan Bangunan

Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pem jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.

Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi dan jaringan tersebut siap digunakan.

Irigasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.

Aset tetap lainnya

Buku perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan. Hewan ternak dan tanaman diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan hewan ternak dan tanaman tersebut siap untuk dimanfaatkan.

Konstruksi dalam Pengerjaan

Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayarkan pada pihak selain dari kontraktor. Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek dinilai dengan nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

Kewajiban Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.

1. Pendapatan

a. Pendapatan – LRA

Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

b. Pendapatan – LO

Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

2. Beban

Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nihil kekayaan bersih.

3. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/social dimasa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber – sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

4. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

5. Ekuitas

Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan ekuitas

BAB IV

PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Selama periode/tahun anggaran 2020, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu Menargetkan Pendapatan Asli Daerah senilai **Rp. 6.120.300.000,-** dari target tersebut terealisasi senilai **Rp. 8.523.239.854,-** atau **139%** dari total target, dan menerima anggaran pengeluaran senilai **Rp. 5.255.192.152,-** yang digunakan untuk membiayai kegiatan Badan Pendapatan Daerah yang merupakan urusan pemerintahan fungsi penunjang terelisasi senilai **Rp. 5.114.961.463,-** atau 97,33% dari total anggaran.

A. PENJELASAN POS- POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

1. PENDAPATAN

Pendapatan Pajak Asli Daerah (PAD) Pendapatan Pajak Asli Daerah (PAD) tahun 2020 sebesar Rp. **6.120.300.000,-** dihitung berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Asli Daerah dari target Rp. **8.523.239.854,-** pada Badan Pendapatan Daerah dapat diurai sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Target (Rp)	Realisasi	(%)	Ket
4.1	Pendapatan Asli Daerah						
4.1.1.01	Pajak Hotel	1	Tahun	21.000.000	27.375.000	130,00	
4.1.1.01.14	Rumah Penginapan, Wisma dan sejenisnya.						
4.1.1.02	Pajak Restoran	1	Tahun	240.000.000	459.254.766	191,00	
4.1.1.02.08	Rumah makan, kantin, kafe, dan sejenisnya						
4.1.1.03	Pajak Hiburan	1	Tahun	2.000.000	0,00	0,00	
4.1.1.03.19	Pajak Hiburan dan sejenisnya.						
4.1.1.04	Pajak Reklame	1	Tahun	70.000.000	37.683.328	54,00	
4.1.1.04.11	Billboard, neon box, kain, stiker dan sejenisnya.						
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	1	Tahun	2.500.000.000	5.538.019.185	222,00	
4.1.1.05.03	Pajak Penerangan Jalan						
4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	1	Tahun	1.152.300.000	1.074.567.047	93,00	
4.1.1.06.40	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C						
4.1.1.08	Pajak Air Bawah Tanah	1	Tahun	7.000.000	0,00	0,00	
4.1.1.08.01	Pajak Air Bawah Tanah						
4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	1	Tahun	8.000.000	8.850.000	111,00	
4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet						

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020 Badan Pendapatan Daerah

4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1	Tahun	1.750.000.000	968.030.478	55,00
4.1.1.11.03	PBB Sektor Perkotaan dan Perdesaan					
4.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).	1	Tahun	370.000.000	409.460.050	111,00
4.1.1.12.03	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).					
Jumlah				6.120.300.000	8.523.239.854	139,00

B. BELANJA

Belanja pada umumnya meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga. Dalam Tahun Anggaran 2020 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu Terdapat Beberapa Belanja Yakni Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal.

Alokasi Anggaran Tahun 2020 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu Sebesar **Rp. 5.255.195.152,-** yang terbagi kedalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Pada Belanja Tidak Langsung terdapat Anggaran Sebesar Rp. **3.814.793.152,-** dan pada Belanja Langsung Sebesar **Rp. 1.440.402.000,-**. Pertanggal 31 Desember 2020 Anggaran Tersebut Telah Terealisasi Sebesar **Rp. 5.114.961.463,-** atau Sebesar **97,33 %** dari Total Anggaran yang Ada.

Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020 Sebagai Berikut :

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dengan Realisasi Anggaran Tahun 2020 Sebesar **Rp. 5.038.924.652,-** dengan Rincian Sebagai Berikut :

Uraian	Anggaran	Realisasi	
		2020	2019
Belanja Pegawai	3.814.793.152	3.715.648.208	3.865.899.886

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020 Badan Pendapatan Daerah

Belanja Barang dan Jasa	1.224.131.500	1.183.292.755	916.056.763
Jumlah	5.038.924.652	4.898.940.963	4.781.956.649

Uraian Belanja Operasi Sebagai Berikut :

A. BELANJA PEGAWAI :

I. Belanja Pegawai Terdiri atas :

I.1. Belanja Tidak Langsung

1.a. Gaji dan Tunjangan

Gaji dan Tunjangan dengan Alokasi Anggaran senilai **Rp. 3.237.493.152,-** dengan Realisasi Sebesar **Rp. 3.237.493.152,-**

2.b. Tambahan Penghasilan PNS

Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Prestasi Kerja dengan Alokasi Anggaran senilai **Rp.469.800.000,-** dengan realisasi **Rp. 438.269.351,-**

3.c. Biaya Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Biaya Insentif Pemungutan Pajak Daerah dibayarkan berdasarkan realisasi pencapaian PAD, dengan Alokasi Anggaran senilai **Rp. 107.500.000,-** dengan realisasi senilai **Rp.39.885.705,-** Terdapat sisa anggaran senilai **Rp.67.614.295,-**.

B. BELANJA BARANG DAN JASA

Belanja Barang dan Jasa dengan Alokasi Anggaran Senilai **Rp. 1.052.891.500,-** dengan Realisasi Sebesar **Rp. 1.016.852.755,-** dan Belanja Honorarium PNS dan Non PNS dengan Alokasi Anggaran **171.240.000,-** dengan Realisasi **166.440.000,-** dengan Rincian Sebagai Berikut :

Program dan Kegiatan			Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	%
01	Keg	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	469.958.650	462.920.605	7.038.045	98,94
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.943.000	9.943.000	-	100
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	55.800.000	54.436.378	1.363.622	96
	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	13.913.000	9.113.000	4.800.000	65
	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Badan / Operasional	0,00	0,00	-	0,00
	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	72.127.000	72.127.000	-	100
	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	21.613.150	21.613.150	-	99
	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	38.127.700	38.127.700	-	100
	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.755.500	43.055.500	700	99
	15	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.680.000	4.680.000	-	100
	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	4.800.000	4.800.000	-	100
	20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	130.000.000	129.861.277	138.723	98
	19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	30.799.300	30.763.600	35.700	99
	20	Penyediaan Jasa Kantor	44.400.000	44.400.000	-	100
02		PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	124.970.500	124.970.500	-	100
	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	-	-	-

	23	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	-	-	-	-
	24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Badan / Operasional	27.000.000	27.000.000	-	100
	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	13.400.000	13.400.000	-	100
06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	12.002.700	12.002.700	-	100
	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dari ikhtisar realisasi kinerja OPD	2.799.700	2.799.700	-	100
	02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	1.403.250	1.403.250	-	100
	04	Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2.799.750	2.799.750	-	100
	07	Penyusunan Renja, Renstra, RKA, RKAP, DPA, dan DPPA OPD	5.000.000	5.000.000	-	100
09		PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-
	01	Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Hasil-hasil pembangunan Daerah	-	-	-	-
17		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	640.078.150	606.637.850	33.436.300	94
	19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber- Sumber Pendapatan Daerah	311.431.350	277.995.050	33.436.300	99
	36	Pemeriksaan/Penangan an Kasus atas Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Bidang Perpajakan	40.565.800	40.565.800	4.000	99
	37	Upaya Peningkatan PAD Melalui Peninjauan Zona Nilai Tanah PBB- P2	237.400.000	237.400.000	-	100

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020 Badan Pendapatan Daerah

	66	Penyusunan Peraturan Bupati Pajak Air Bawah tanah dan Pajak Hiburan	50.681.000	50.681.000	-	100
18		PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA	61.692.000	61.331.0600	360.400	99
	08	Pencetakan Massal dan Pencetakan Baliho	61.692.000	61.331.0600	360.400	99
		Jumlah	1.440.402.000	1.399.313.255	41.088.745	97

2. Belanja Modal

Belanja Modal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu meliputi Belanja Peralatan dan mesin, alat ukur, peralatan, perlengkapan alat kantor dan mesin, pengadaan alat kantor dengan rincian belanja modal sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi	
			2020	2019
1.	Tanah		-	-
2.	Peralatan dan Mesin	216.270.500	216.020.500	260.201.500
3.	Belanja Bangunan dan Gedung		-	-
4.	Jalan, jaringan dan Instalasi		-	-
	Jumlah	216.270.500	216.020.500	260.201.500

II. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

1. Pendapatan Laporan Operasional (LO)

Pendapatan Laporan Operasional (LO) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut.

Realisasi Pos Anggaran Pendapatan Pajak Daerah Laporan Operasional per 31 Desember 2020 adalah senilai **Rp.8.523.239.854,-**

No.	Uraian	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/ penurunan	%
1.	Pendapatan - LO	8.523.239.854,00	9.685.255.260,00	(1.162.015.406,00)	12,00
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	8.523.239.854,00	9.685.255.260,00	(1.162.015.406,00)	12,00
	Pendapatan Pajak Daerah - LO	8.523.239.854,00	9.685.255.260,00	(1.162.015.406,00)	12,00
	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lain-lain PAD yang sah - LO	0,00			
	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bantuan Keuangan LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Hibah – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Darurat – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Beban

Beban dapat didefinisikan sebagai penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau aset timbulnya kewajiban.

Saldo Beban per 31 Desember 2020 adalah senilai **Rp.5.042.433.550,-** terdiri dari :

No.	Uraian	2020	2019
1.	Beban Pegawai - LO	3.715.648.208	3.865.899.886
2.	Beban Barang & Jasa	1.183.292.755	374.683.338
4.	Beban Penyusutan Amortisasi	143.492.587	290.836.426

5.	Beban Penyisihan piutang		857.555.536
6.	Beban lain-lain		6.693.787

3. Surplus/defisit Laporan Operasional

Pada Laporan Operasional tahun anggaran 2020 terdapat pendapatan LO senilai **Rp. 8.523.239.854,-** dan realisasi beban **Rp. 5.042.433.550,-** maka mengalami surplus senilai **Rp. 3.480.806.304,-** karena pendapatan lebih besar dari realisasi beban.

III. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Laporan ekuitas dapat dirinci sebagai berikut :

Nilai Ekuitas awal Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2020 senilai :

No.	Uraian	2020	2019
1.	Ekuitas Awal	4.815.045.416,88	4.733.970.718,98
2.	Surplus/Defisit-LO	3.480.806.304,00	3.745.914.661,90

Dampak Kumulatif Perubahan pada kebijakan / kesalahan yang mendasar dapat diurai sebagai berikut :

1. Koreksi ekuitas lainnya per 31 Desember 2020 senilai Rp 0,00
2. Mutasi Aset Tetap pada Badan Pendapatan Daerah senilai Rp.0,00
3. Koreksi Perubahan Kebijakan Akuntansi pada Badan Pendapatan Daerah senilai Rp.0,00

Kewajiban untuk dikonsolidasikan senilai **Rp (3.638.192.464,00)**.

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2020 senilai **Rp. 4.657.659.256,88,-**

IV. PENJELASAN POS- POS NERACA

a. Aset

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1.	Aset Lancar	3.065.057.848,88	3.073.185.986,88

2.	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
3.	Aset Tetap	1.916.655.063,00	1.732.100.319,00
4.	Aset Lainnya	132.623.785,00	9.761.111,00

1. Aset Lancar

Aset Lancar adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2020 pada Badan Pendapatan Daerah senilai **Rp. 3.065.057.848,88** senilai :

No.	Uraian	2020	2019
1	Kas di bendahara penerimaan	0,00	12.981.218,00
2.	Kas di bendahara pengeluaran	0,00	0,00
3.	Kas di BLUD	0,00	0,00
4.	Kas Lainnya	0,00	0,00
5.	Setara Kas	0,00	0,00
6.	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
7.	Piutang Pendapatan	10.274.803.018,43	10.274.803.018,43
8.	Piutang Lainnya	0,00	0,00
9.	Penyisihan piutang	(7.253.277.129,55)	(7.253.277.129,55)
10	Beban dibayar dimuka	0,00	0,00
11.	Persediaan	43.531.960,00	38.678.880,00
	Jumlah	3.065.057.848,88	3.073.185.986,88

1. Saldo Kas di bendahara penerimaan pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Pasangkayuper 31 Desember 2020 senilai : 0,00.
2. Saldo Kas di bendahara pengeluaran pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Pasangkayuper 31 Desember 2020 senilai : 0,00.
3. Saldo Kas BLUD pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Pasangkayuper 31 Desember 2020 senilai : 0,00.
4. Saldo Kas Lainnya pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Pasangkayuper 31 Desember 2020 senilai : 0,00.
5. Saldo pada Setara Kas pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Pasangkayu per 31 Desember 2020 senilai : 0,00.

6. Saldo pada Investasi Jangka Pendek pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Pasangkayu per 31 Desember 2020 senilai : 0,00.
7. Saldo Piutang pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Pasangkayu per 31 Desember 2020 senilai : 10.274.803.018,43.
8. Saldo Piutang lainnya pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Pasangkayu per 31 Desember 2020 senilai : 0,00.
9. Saldo Penyisihan Piutang pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Pasangkayu per 31 Desember 2020 senilai : (7.253.277.129,55)
10. Saldo Beban dibayar dimuka pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Pasangkayu per 31 Desember 2020 senilai : 0,00.
11. Saldo pada persediaan pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Pasangkayu per 31 Desember 2020 senilai : Rp.43.531.960,00.

2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Pasangkayu per 31 Desember 2020 senilai : Rp. 0,00.

No.	Uraian	2020	2019
1.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00.	0,00.
2.	Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00.	0,00.
	Jumlah	0,00.	0,00.

Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Pasangkayu per 31 Desember 2020 senilai : 0,00.

Investasi Jangka Panjang Permanen

Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Pasangkayu per 31 Desember 2020 senilai : 0,00.

3. Aset Tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2020 senilai Rp. 1.916.655.063,- dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	2020	2019
-----	--------	------	------

1.	Tanah	-	-
2.	Peralatan dan Mesin	4.027.576.590	3.704.386.209
3.	Belanja Bangunan dan Gedung	1.487.796.850	1.487.796.850
4.	Aset Tetap Lainnya	-	-
5.	Jalan, jaringan dan Instalasi	23.359.000,00	23.359.000,00
6.	Akumulasi Penyusutan	(3.622.077.377)	(3.483.441.740)

Tanah

Saldo Tanah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 senilai **Rp. 0**.

Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 senilai **Rp. 4.027.576.590,-**

Belanja Bangunan dan Gedung

Saldo Belanja Bangunan dan Gedung Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 senilai **Rp. 1.487.796.850,-**

Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 senilai **Rp. 0,00**

Jalan, jaringan dan Instalasi

Saldo Jalan, jaringan dan Instalasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 senilai **Rp. 23.359.000,00**

Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 senilai **Rp. (3.622.077.377,00)**.

4. Dana Cadangan

Saldo Dana Cadangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 senilai **Rp. 0,00**.

5. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Pasangkayuper 31 Desember 2020 senilai **Rp. 0,00**

No.	Uraian	2020	2019
1.	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
2.	Kemitraan dengan Pihak ketiga	0,00	0,00
3.	Aset tidak berwujud	131.450.000,00	0,00
4.	Aset lain-lain	1.173.785,00	9.761.111,00
	Jumlah	132.623.785,00	9.761.111,00

Tagihan Jangka Panjang

Saldo Tagihan Jangka Panjang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayuper 31 Desember 2020 senilai **Rp. 0,00**

Kemitraan dengan Pihak ketiga

Saldo Kemitraan dengan Pihak ketiga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayuper 31 Desember 2020 senilai **Rp. 0,00**

Aset tidak berwujud

Saldo Aset tidak berwujud Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayuper 31 Desember 2020 senilai **Rp. 0,00**

Aset lain-lain

Saldo Aset lain-lain Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 senilai : 16.454.898,00

6. Kewajiban

No.	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1.	Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00
	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

1. Kewajiban Jangka Pendek Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 senilai **Rp. 0,00**

No.	Uraian	2020	2019
1.	Utang perhitungan Pihak ketiga (PFK)	0,00	0,00
2.	Utang Bunga	0,00	0,00
3.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
4.	Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00
5.	Utang Beban	0,00	0,00
6.	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
7.	R/K Pusat	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

Utang perhitungan Pihak ketiga (PFK)

Utang perhitungan Pihak ketiga (PFK) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 senilai : 0,00

Utang Bunga

Saldo Utang Bunga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 senilai : 0,00

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 senilai : 0,00

Pendapatan diterima dimuka

Saldo Pendapatan diterima dimuka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 senilai : 0,00

Utang Beban

Saldo Utang Beban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 senilai : 0,00

Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 senilai : 0,00

R/K Pusat

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 senilai : 0,00

2. Kewajiban Jangka Panjang

No.	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1.	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
2.	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

Utang Dalam Negeri

Saldo Utang Dalam Negeri Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 senilai : 0,00

Utang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Utang Jangka Panjang Lainnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 senilai : 0,00

7. Ekuitas

No.	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1.	Ekuitas	4.657.659.256,88	4.815.045.416,88
	Jumlah	4.657.659.256,88	4.815.045.416,88

1. Ekuitas

Nilai saldo Ekuitas Per 31 Desember 2020 pada Badan Pendapatan Daerah adalah senilai **Rp. 4.657.659.256,88.**

BAB V

PENUTUP

Pada akhir Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) OPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020 ini, ada beberapa hal penting yang perlu disampaikan berkenaan dengan Laporan Keuangan OPD tiap akhir tahun anggaran. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020 per 31 Desember 2020, telah di susun dengan berdasar kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Realisasi Anggaran Tahun 2020 pada anggaran Belanja Langsung Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 dengan penyerapan anggaran sebesar **97,33%** dan telah sesuai dengan target yang diharapkan.
3. Kas pada Saldo Kas Bendahara Pengeluaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020, adalah **Rp.0,00-**
4. Neraca OPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020, menggambarkan posisi keuangan yakni posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Per 31 Desember 2020, pada Pos Aset Tetap telah dilakukan perhitungan nilai penyusutan Aset yang ada.
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini di susun berdasarkan penggunaan anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020.

Demikian Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu yang di buat dan dilaporkan per 31 Desember 2020. Laporan ini disampaikan sebagai laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Diharapkan, Laporan Keuangan ini dapat menjadi bahan acuan semua pihak dalam penilaian kinerja instansi pemerintah, khususnya

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu yang merupakan wujud dari transparansi dan akuntabel sesuai dengan yang diamanatkan dalam tata kelola Good Goovernance.

